

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era persaingan global, Indonesia memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat, jujur, berakhlak mulia, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan sebagai jalur utama pengembangan SDM dan pembentukan karakter adalah kata kunci dalam menentukan nasib bangsa.

Dunia pendidikan masih menghadapi empat masalah besar yang perlu segera dibenahi oleh semua pihak. Keempat masalah itu meliputi soal rendahnya mutu pendidikan, belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan, kurang kuatnya relevansi antara pendidikan dengan dunia kerja dan masih rendahnya tingkat efisiensi manajemen pendidikan.

Sejalan dengan paradigma baru penyelenggaraan otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan di daerah atas prakarsa sendiri, termasuk di dalamnya pengelolaan penyelenggaraan di bidang pendidikan. Dengan adanya permasalahan pendidikan yang dihadapi daerahnya, yaitu rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang, belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan, kurang kuatnya relevansi antara pendidikan dengan dunia kerja dan masih rendahnya tingkat efisiensi manajemen pendidikan,

maka daerah diharapkan mampu menunjukkan peranannya dalam mengupayakan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Salah satu langkah yang perlu ditempuh dalam mengatasi keempat permasalahan besar bidang pendidikan yakni dengan melaksanakan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sebab, pada dasarnya dalam konsep MBS terkandung gagasan tentang perlunya pendidikan dikembalikan kepada masyarakat, serta perlunya manajemen penyelenggaraan pendidikan di sekolah dikelola secara profesional.

Lahirnya UU No. 22/1999 (yang saat ini telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat PP yang berkaitan, telah membawa perubahan paradigma pengelolaan sistem pendidikan. Tentu ini akan berdampak terhadap perubahan struktural dalam pengelolaan pendidikan, dan penentuan stakeholders di dalamnya. Jika di masa lalu, stakeholders pendidikan itu sepenuhnya ada di tangan aparat pusat, maka dalam era otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai stakeholders itu akan tersebar di berbagai pihak yang berkepentingan. Melalui otonomi ini, maka pengelolaan pendidikan yang awalnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dengan desentralisasi, sekolah memiliki otonomi untuk mengelola pendidikan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan peran serta dalam pengelolaan pendidikan.

Untuk mendukung penerapan desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan, telah diadopsi model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang dalam bahasa aslinya dikenal dengan istilah *School Based Management*, sebagai

konsep pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah. MBS merupakan model pengelolaan sekolah yang memfasilitasi keterlibatan para stakeholders pendidikan di sekolah untuk secara aktif bersama-sama bertanggung jawab mengembangkan sistem pengelolaan sekolah yang otonom dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomi atau kemandirian sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah kebijakan serta jalannya pendidikan di daerah masing-masing. Salah satu tujuan dari adanya MBS ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan, khususnya di sekolah dapat dilakukan melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah.

Di samping pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan, MBS juga bertujuan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua stakeholders pendidikan di sekolah, sehingga tercipta *sense of belonging* (rasa memiliki). Dengan demikian akan terjadi; makin besar tingkat partisipasi dari para stakeholders, maka makin besar pula rasa memiliki, sehingga rasa tanggung jawab dan dedikasi juga meningkat.

Implementasi MBS tidak hanya sekedar membawa perubahan dalam kewenangan akademik sekolah dan tatanan pengelolaan sekolah, akan tetapi membawa perubahan dalam pola kebijakan dan orientasi partisipasi orang tua dan

masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Implementasi MBS melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pendidikan di tingkat sekolah sebagai mitra langsung dalam pengelolaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

MBS merupakan suatu model pendidikan yang didalamnya terdapat pelibatan masyarakat secara langsung. Masyarakat adalah stakeholders yang memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pelanggan pendidikan yang secara langsung maupun tidak langsung membiayai pendidikan, baik melalui uang sekolah maupun pajak, sehingga sekolah seharusnya bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan konsep MBS berimplikasi terhadap perlu dibentuknya suatu lembaga yang dalam konteks MBS disebut sebagai Dewan Sekolah atau Komite Sekolah, merupakan lembaga yang mewadahi keterlibatan para stakeholders pendidikan untuk berkiprah dalam mewujudkan sekolah yang otonom dan berkualitas tinggi.

Mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002, maka pengertian komite sekolah

Adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan pra sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

Komite sekolah merupakan suatu badan atau suatu lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai

unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Komite sekolah terdiri dari unsur-unsur orang tua siswa, wakil siswa, wakil guru-guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat setempat (ulama, budayawan, pemuka adat, dan cendikia pemerhati pendidikan), wakil masyarakat terinstitusi (lurah, camat, dan pejabat lain yang ada di wilayah sekolah), dan utusan pejabat pengendali pendidikan (dinas pendidikan).

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 56:

- a. Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dalam peningkatan mutu, dukungan, dan pengawasan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.
- c. Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk untuk memberi arahan, dukungan dan pengawasan pada tingkat satuan pendidikan.
- d. Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, telah mengantarkan proses pembentukan komite sekolah hampir di seluruh daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan di seluruh pelosok tanah air. Proses pembentukan beberapa komite sekolah memang ada yang sudah sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada, bahkan ada yang sudah melesat sedemikian rupa dengan kreasi dan inovasinya yang membanggakan, sehingga peran dan fungsinya dapat dirasakan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun perlu diakui pula bahwa masih banyak di antaranya yang belum

sepenuhnya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada. Bahkan ada beberapa di antaranya yang keberadaannya justru menimbulkan citra negatifnya sendiri.

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 peranan komite sekolah terdiri dari empat, yaitu: Badan pertimbangan (*advisor agency*), yaitu memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas kependidikan.

Badan pendukung (*supporting agency*), mendorong orang tua, masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana/biaya untuk penyelenggaraan pendidikan dan mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Badan pengontrol (*controlling agency*), melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Badan mediator (*mediator agency*), melakukan kerjasama dengan masyarakat dan menampung, menganalisa kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat maupun sekolah.

Dalam melaksanakan perannya, komite sekolah berfungsi memwadahi partisipasi para stakeholders untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya serta meningkatkan partisipasi para stakeholders pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan memonitoring pelaksanaan kebijakan sekolah dan

pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan peserta didik secara proporsional dan terbuka.

Selain itu, komite sekolah juga berfungsi untuk mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Dengan demikian komite sekolah berperan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Jika peran dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan tingkat kewajaran pada satuan pendidikan, maka tujuan memberdayakan komite sekolah sebagai mitra sekolah yang independen, kapabel dan konsen dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah pasti akan terwujud.

Untuk melihat lebih jauh kondisi di lapangan, penulis mengadakan studi pendahuluan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Babakan Ciparay. Dari hasil studi pendahuluan, penulis menemukan terdapat 43 unit SDN di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dengan jumlah kepala sekolah sebanyak 34 orang, jumlah guru sebanyak 241 orang, dan jumlah komite sekolah sebanyak 13 orang. Komite sekolah di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung ini tidak terlalu diberdayakan dan belum memiliki program kerja secara tertulis. Dalam melaksanakan studi pendahuluan, peneliti menemukan beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan komite sekolah. Pelaksanaan

tugas komite sekolah hanya pada waktu-waktu tertentu saja, beberapa komite sekolah hanya datang apabila mendapat undangan dari kepala sekolah dan selebihnya jarang datang ke sekolah. Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi komite sekolah berdampak pada kurang diberdayakannya komite sekolah. Selain itu juga, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan komite sekolah, maksudnya masyarakat khususnya orang tua murid menganggap komite sekolah tidak lain dan tidak bukan sebagai BP3. Masalah lain yang timbul adalah hubungan antara komite sekolah dan kepala sekolah kurang harmonis. Hal ini diakibatkan karena kepala sekolah menganggap komite sekolah itu sebagai pengawas, gerak kepala sekolah seolah diawasi oleh komite sekolah, sehingga baik kinerja kepala sekolah maupun komite sekolah kurang optimal.

Seharusnya, komite sekolah di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung lebih diberdayakan lagi dengan memiliki tugas dan fungsi yang tertulis dan dilaksanakan dengan optimal. Komite sekolah dapat menampung dan menyalurkan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam menangani pembangunan bidang pendidikan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya diwujudkan dengan sekedar memberikan bantuan finansial sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Namun, juga perlu memberikan bantuan dalam bentuk yang lebih substansial.

Setidaknya, komite sekolah untuk lebih berperan didalam penanganan masalah. Masalah seputar pelaksanaan pendidikan di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Masalahnya, tinggal bagaimana semua pihak yang terkait oleh tanggung jawab

sosial, bisa konsisten dalam memberikan dukungan pada penyelenggaraan pendidikan, serta konsisten dalam usaha menarik lebih besar bagi keterlibatan masyarakat lainnya.

Diharapkan, melalui komite sekolah masyarakat bisa terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Jadi, Komite Sekolah harus didorong agar bisa berfungsi secara optimal, sehingga bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap peningkatan mutu pendidikan di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

Berdasarkan gambaran di atas, masih banyak komite sekolah yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengaruh komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan dengan mengadakan penelitian yang berjudul *Pengaruh Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung*.

B. Rumusan Masalah

Karena luasnya masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahannya. Hal ini dimaksudkan agar masalah yang diteliti dapat dipahami oleh penulis serta menjadi lebih terarah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tugas pokok dan fungsi komite sekolah di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung?

2. Bagaimana gambaran mutu pendidikan di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung?

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan untuk dijadikan masukan kepada pihak-pihak terkait sebagai penentu kebijakan mengenai kondisi nyata di lapangan tentang bagaimana kondisi kemampuan komite sekolah.
2. Bagi SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pijakan untuk mengadakan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan stakeholders yang lebih aktif, efektif, dan produktif dalam rangka mengembangkan visi dan misi sekolah.
3. Membantu mengoptimalkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat serta mendorong upaya peningkatan mutu.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai seberapa besar pengaruh komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi tugas pokok dan fungsi komite sekolah di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay kota Bandung.
- b. Untuk memperoleh gambaran mengenai mutu pendidikan di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.
- c. Untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

E. Anggapan Dasar

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar-benar ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan, peneliti memiliki beberapa titik tolak pemikiran yang melandasinya, sebagaimana dikemukakan Suyatna Basar Atmadja (1995:26) bahwa: “Anggapan dasar atau postulat adalah suatu titik tolak pemikiran yang kebenarannya dapat diterima oleh pihak peneliti”. Adapun yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini menurut penulis adalah:

1. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan.

2. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan pra sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.
3. Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada masukan, proses, keluaran, dan dampaknya.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau tekaan tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya.

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah “terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung”.

G. Paradigma Penelitian

Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

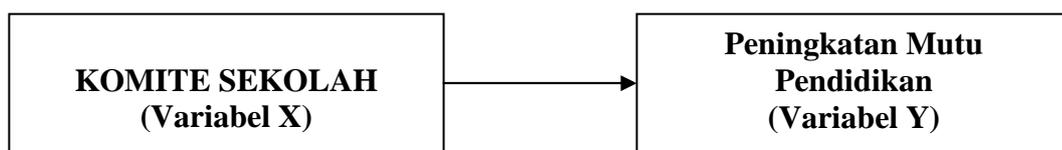
Berdasarkan Kepmendiknas Nomor. 044/U/2002 peranan komite sekolah terdiri dari empat, yaitu: badan pertimbangan (*advisor agency*), badan pendukung

(*supporting agency*), badan pengontrol (*controlling agency*), dan badan mediator (*mediator agency*).

Komite sekolah berfungsi mewadahi partisipasi para stakeholders untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya serta meningkatkan partisipasi para stakeholders pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan memonitoring pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan peserta didik secara proporsional dan terbuka. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, komite sekolah bekerja sama dengan pihak sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Komite sekolah merupakan wujud partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Dengan terwujudnya partisipasi yang lebih efektif serta kerjasama dari pihak-pihak stakeholders tersebut akan lebih memungkinkan untuk memperbaiki kualitas lulusan, hal ini diakibatkan oleh semakin baiknya pelayanan yang diberikan oleh sekolah dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan adanya komite sekolah diharapkan sebagai awal dalam melakukan pembaruan terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan.

Gambaran paradigma penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1

Hubungan variabel penelitian

Variabel X : Komite Sekolah

Variabel Y : Peningkatan Mutu Pendidikan

—————▶ : Pengaruh

H. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal ini berdasarkan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu pengaruh komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Penelitian ini meneliti mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi.

2. Teknik Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik komunikasi tertutup atau tidak langsung, dilengkapi dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hubungan penelitian dengan responden dilakukan melalui angket sebagai alat pengumpul data.